

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 17, 20 DAN 25 APRIL 2017



TENTANG LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

Hari : SENIN
Tanggal : 17 April 2016
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Rembang

II. SIFAT RAPAT : Terbuka

III. ACARA RAPAT:

1. Pembukaan;
2. Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016;
3. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: - orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 28 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 1 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	: 17 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikumWr. Wb.

- Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab.
Rembang.
- Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang.
- Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda,
Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, Instansi dan
Camat se Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali Rapat Paripurna ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini Senin tanggal 17 April 2017 kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal-afiat untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembahasan LKPD Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016.

Adapun yang menjadi agenda pokok dalam rapat paripurna ini, sebagaimana yang dihasilkan oleh Badan Musyawarah DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rembang dalam

rapatnya pada tanggal 3 April 2017 yaitu Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

LKPJ Akhir Tahun Anggaran merupakan implementasi dari : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan : LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Memenuhi ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 130.04/0620/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Penyampaian LKPJ Bupati Rembang, telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Pada Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dijelaskan bahwa Rapat Paripurna selain rapat untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati/wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 28 orang. Dengan demikian, kuorum dalam rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucapkan **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 12.35 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum berlangsung ke acara pokok, terlebih dahulu akan saya sampaikan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan,
2. Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016;
3. Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu : Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016.

Kepada Bupati Rembang, Saudara H. ABDUL HAFIDZ dipersilahkan.

====PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI AKHIR TA 2016====

➤ *(Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 terlampir)*

Terimakasih Saudara Bupati atas penyampiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Demikian baru kita ikuti dan dengar bersama penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 oleh Saudara Bupati Rembang. LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 ini selanjutnya akan dibahas oleh Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan hasilnya akan disampaikan dalam Rapat Paripurna Internal DPRD pada hari Kamis tanggal 20 April 2017.

Dengan telah disampaikannya LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 oleh Saudara Bupati, maka selesai sudah Rapat Paripurna pada hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat.

Akhirnya dengan mengucapkan “Alhamdulillahirobbil ‘alamin” tepat pukul 13.35 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA

H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS

Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN :RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
REMBANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD
dan Camat Se Kabupaten Rembang;

LAMPIRAN II : Penyampaian Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
Rembang Akhir Tahun Anggaran 2016.

RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PEMBAHASAN LKPJ BUPATI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
HARI/TANGGAL : SENIN, 17 APRIL 2017
PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, .M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd.	Anggota	23	
24	Dono, S. W. S. S. S.	Anggota	24	

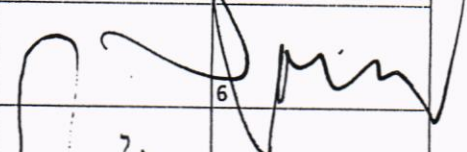
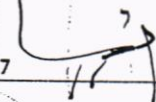
	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	<i>[Signature]</i>
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	<i>[Signature]</i>
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	<i>[Signature]</i>
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41	<i>[Signature]</i>
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	<i>[Signature]</i>
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	<i>[Signature]</i>
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	<i>[Signature]</i>
45	NUR JANNAH	Anggota	45	<i>[Signature]</i>

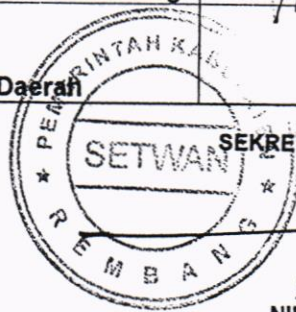
Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PEMBAHASAN LKPJ BUPATI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
HARI/TANGGAL : SENIN, 17 APRIL 2017
PUKUL : 11.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I	Bupati Rembang	1 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E	Wakil Bupati Rembang	2 
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3
4	DZULKARNIAN, S.H, M.H	Pengadilan Negeri Rembang	4 
5		Dandim 0720 Rembang	5
6	PRANANDYA SUBIYAKTO, S.H, M.HUM	Waka Kepolisian Resort Rembang	6 
7	Drs. QOSYIM, S.H, M.Si	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8 

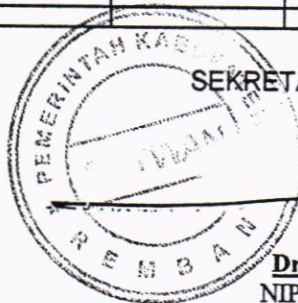


SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PEMBAHASAN LKPJ BUPATI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
HARI/TANGGAL : SENIN, 17 APRIL 2017
PUKUL : 11.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	H. Agus Salwa	1
2	CAMAT KALIORI	M. USTHOULH	2
3	CAMAT SUMBER	HERMIDW	3
4	CAMAT SULANG	Stamet Hartono	4
5	CAMAT BULU	STIKHATORO	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. Wiyono	6
7	CAMAT GUNEM	TEBUT H. G.	7
8	CAMAT SALE	KUNARSI	8
9	CAMAT LASEM		9
10	CAMAT PANCUR	Inuh	10
11	CAMAT SEDAN	Dipatiko	11
12	CAMAT SLUKE	Subagyo	12
13	CAMAT KRAGAN	H. Cing	13
14	CAMAT SARANG	Edy Clewito	14



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

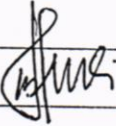
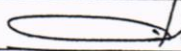
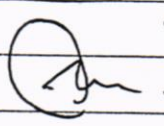
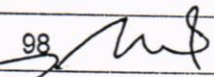
DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PEMBAHASAN LKPJ BUPATI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

HARI/TANGGAL : SENIN, 17 APRIL 2017

PUKUL : 11.00 WIB

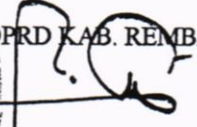
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Wartono	SAB	1
2	STAF AHLI BUPATI	Nur Effendi	SAB / As1	2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Setiawan		8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	A. Agung	Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gantant		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Latipul An		13
14	BAG. UMUM	Sumaryati	Kaumay	14
15	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Tri Hartono	Kaumay	15
16	BPPKAD	Musbi	Kaumay	16
17	INSPEKTORAT	FAHRUDIN	INSPEKTUR	17
18	BAPPEDA	Haris	Bappeda	18
19	DINPERMADES	H. INALUyo		19
20	B K D	Suparman		20
21	DINAS PMPTSP dan TENAGA KERJA			21
22	B P B D	Berhan	Kaumay	22
23	DPU TATA RUANG	Mujoko	Kaumay	23
24	DINPERKIM	Suyono	Kaumay	24
25	DINAS KESEHATAN	Supriyo	Sekdin	25
26	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			26
27	DINAS INDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANPAN	Suratmin		28
29	DINLUTKAN	BUDITONO	Sekretaris	29
30	DISKOMINFO			30
31	DINAS PERHUBUNGAN	Suyono	Kaumay	31
32	DINAS DUKCAPIL	Agus	Sekdin	32
33	DINSOSIAL P2 KB		Kaumay	33
34	DINBUDPAR	Dwi Puwardi	Kaumay	34
35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Priyadi	Kaumay	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS			36

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
37	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Joe M M	ke-	38
39	SATPOL PP			39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49
	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPU KAB. REMBANG			64
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
66	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
67	BTPN KCP. REMBANG			67
68	PERUM PEGADAIAN			68
69	BSM.BANK DANAMON			69
70	DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	PMI CAB. REMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76	DPD PARTAI GOLKAR			76

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	SUARA MERDEKA			84
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM	MASUDI	Reporter	86 
87	RADIO R2B			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90
91	MIMBAR RAKYAT			91
92	CARAKA CANDI			92
93	KEDAULATAN RAKYAT			93
94	Agus	Kodim		94 
95	Eko	Tapem		95 
96	Said	— — —		96 
97	Arnung	— — —		97 
98	Tasmiran	— — —		98 
99	TH FICS	Agus M		99 
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

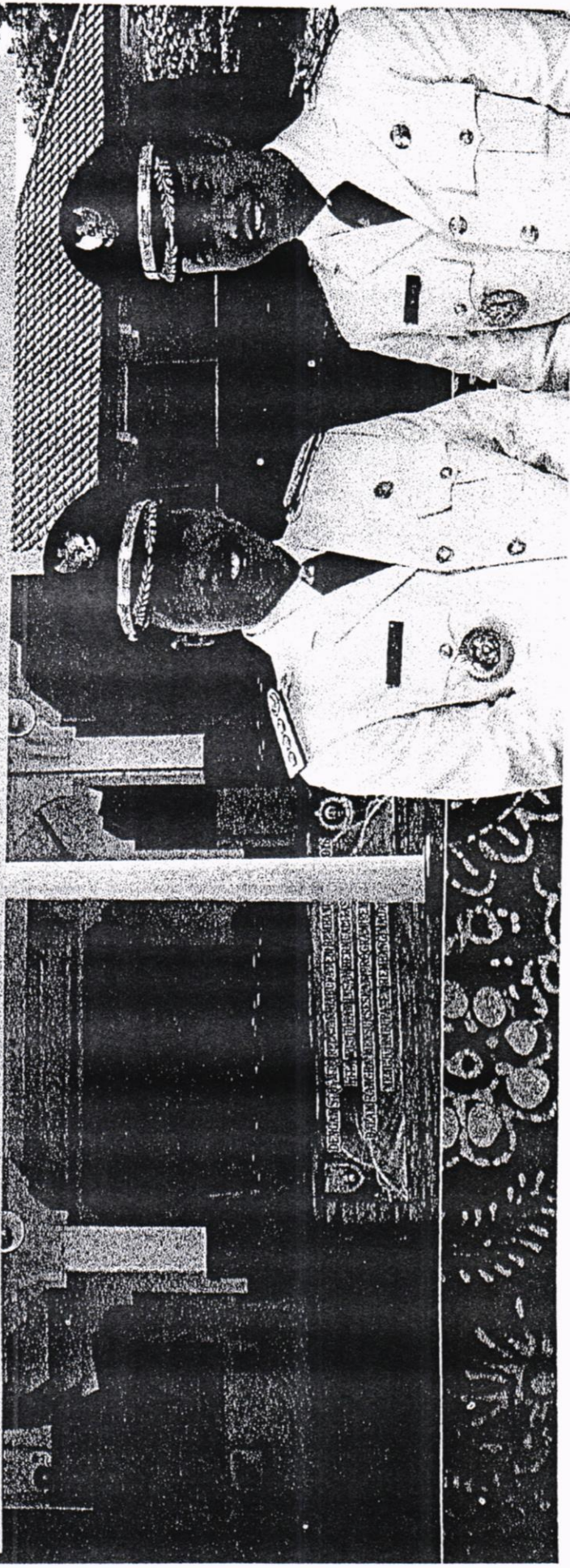


Drs. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011



**Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepada DPRD Kabupaten Rembang Akhir Tahun
Anggaran 2016
Pemerintah kabupaten Rembang Tahun 2017**



INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DI KABUPATEN REMBANG



1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 5,49 % yg dpt diartikan bahwa kondisi perekonomian di Kab. Rembang relatif stabil.
2. Angka inflasi dapat terkendali pada kisaran angka di bawah dua digit yaitu 1,75 % yg menunjukkan tingkat kestabilan harga barang & jasa.
3. Indeks gini rasio sebesar 0,30 yang berarti distribusi pendapatan masyarakat relatif merata & dapat dikategorikan sbg ketimpangan rendah
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 68,18 yg didukung oleh adanya peningkatan komponen-komponen penyusunnya seperti Angka harapan hidup (AHH) sebesar 74,22 dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 6,92.

2. ASPEK PELAYANAN UMUM



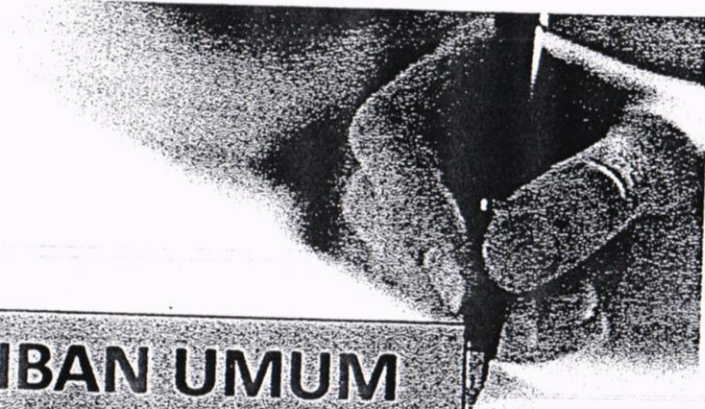
- angka partisipasi murni pendidikan dasar yaitu SD/MI sebesar 86,48 SMP/MTs sebesar 75,91 dan untuk pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA sebesar 51,74
- cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan sebesar 99,94%,
- cakupan desa imunisasi anak (UCI) mencapai 100%,
- cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin berupa kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1 mencapai 100 %.
- proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 83 %
- proporsi daerah irigasi baik mencapai 92 %
- proporsi rumah dengan penerangan listrik mencapai 100%
- proporsi rumah tangga menggunakan jamban sendiri dengan septic tank 90,99%

3. ASPEK DAYA SAING DAERAH



- PDRB Kab. Rembang Atas dasar harga konstan 2010 telah mencapai nilai 10, 848 trilyun rupiah yang terdistribusi dalam 17 sektor lapangan usaha.
- Keberhasilan pembangunan sektor pertanian sebagai kontributor ekonomi terbesar yang dapat diukur dari Nilai Tukar Petani (NTP) tahun terakhir telah mencapai angka 100,64 yang mencerminkan indeks kemampuan petani untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan usaha taninya

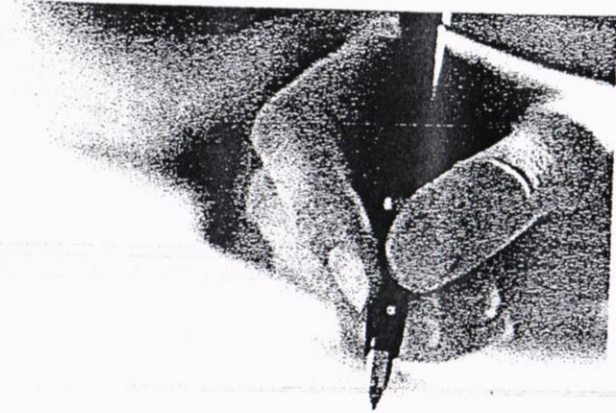
Kondisi daya saing daerah juga ditunjang iklim investasi yang semakin kondusif dengan perbaikan pelayanan perijinan usaha serta relatif terkendalinya gangguan keamanan sehingga mampu memberikan jaminan dan kepastian investasi di Kabupaten Rembang.



4. ASPEK KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selama satu tahun terakhir situasi keamanan dan ketertiban masyarakat relatif kondusif sebagai cerminan karakter masyarakat Rembang yang penuh rasa persaudaraan dan kekeluargaan.

Indikator keamanan dan ketertiban dapat kita rasakan pada situasi dan kondisi wilayah yang tetap terjaga, aman dan tenteram untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, keberlanjutan pembangunan serta kehidupan berdemokrasi yang damai, terutama pasca pelaksanaan pesta demokrasi Pemilukada yang cenderung aman dan tentram.



Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

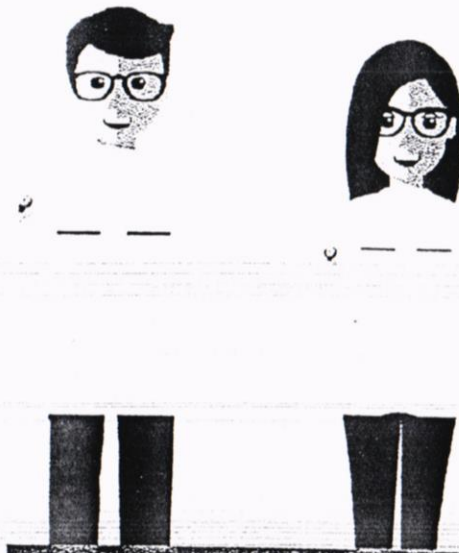
Selanjutnya, secara lebih utuh LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 ini akan Saya sampaikan gambaran ringkas penyelenggaraan pelaksanaan kewenangan urusan wajib dan pilihan



BIDANG PENDIDIKAN

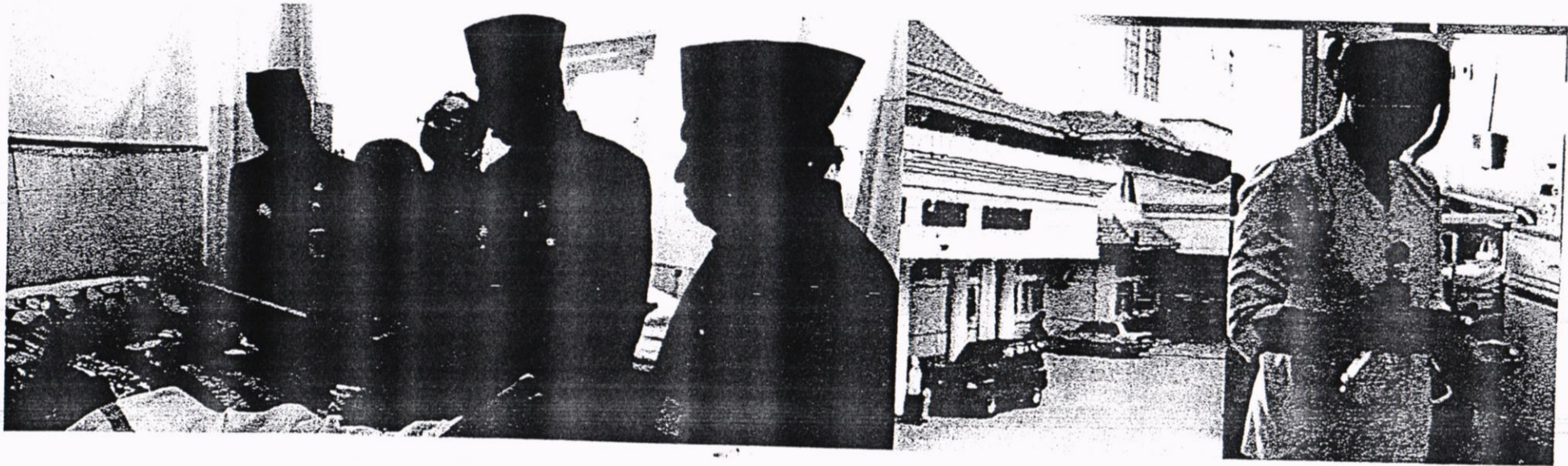
1. Angka melek huruf mencapai 94,96 %
2. Angka Kelulusan SD/MI 97.83%, SMP/MTs 97,33% dan SMA/SMK/MA 103,5%.
3. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 104,40 % sedangkan di tingkat SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mencapai 88,73 %
4. Angka Putus Sekolah SD/MI mencapai 0,02 % SMP/MTs mencapai 0,19 % dan SMA/SMK/MA mencapai 0,42 %
5. Pendidikan Anak Usia Dini mencapai 90,95 %
6. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 92,29 %





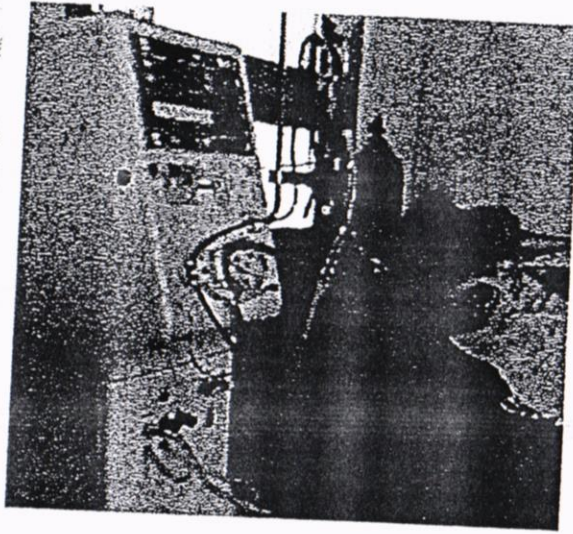
BIDANG KESEHATAN

1. Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani mencapai 100%
2. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan mencapai 100%
3. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mencapai 42 %
4. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mencapai 100%
5. Cakupan kunjungan bayi mencapai sebesar 93,85 %

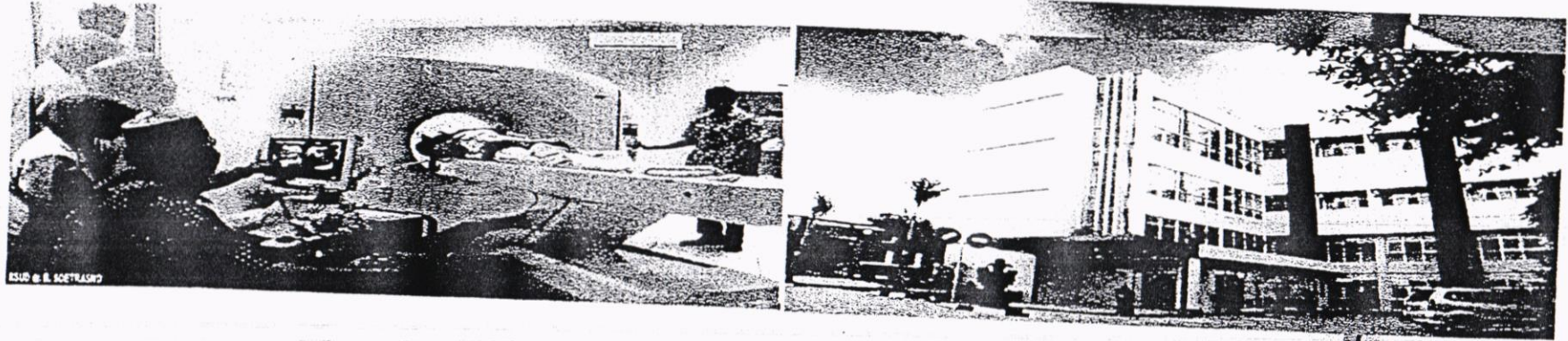


Adapun capaian kinerja mutu pelayanan rumah sakit tahun 2016 meliputi :

1. Angka keterlambatan pelayanan Pertama Gawat Darurat mencapai 0% atau semua pasien tidak terlambat mendapatkan pelayanan pertama gawat darurat.
2. Angka Pasien dengan Dekubitus mencapai 0,01 %.
3. Angka Kejadian Infeksi dengan Jarum Infus mencapai 0,57 % (masih berada dibawah standar maksimal 7 %).
4. Angka Kematian Pasien Gawat Darurat mencapai 0,82 % (masih berada dibawah standar maksimal 1%).
5. Angka Masa Tunggu Sebelum Operasi Elektif (AMSOE) mencapai 0 %.



6. Infeksi Luka Operasi mencapai 0,27 %.
7. Angka Sectio Caesarea mencapai 31,74 %, sedangkan target maksimal 20%.
8. Angka Kematian Ibu Karena Perdarahan (AKIP) mencapai 1,49 %.
9. Angka Kematian Pasien Rawat Inap Intensif (ICU) mencapai 1,56 %.
10. Angka Kematian karena Eklamsia mencapai 0,48 %.



Sedangkan capaian kinerja tingkat pemanfaatan sarana pelayanan rumah sakit tahun 2016 meliputi :

1. Rata-Rata Kunjungan Poliklinik Per Hari mencapai 326 kunjungan.
2. Kebutuhan air minum dan air bersih rumah sakit mencapai 36.172 m³.
3. Prosentase item obat yg tersedia terhadap item obat dalam formularium mencapai 100%.
4. Rata-rata persalinan per hari mencapai 6 persalinan.
5. Gizi (Prosentase Penyediaan Makanan Khusus) mencapai 100% atau sudah tercukupi penyediaan makanan khusus.
6. Radiologi (Prosentase Pemeriksaan dari Luar Rumah Sakit) mencapai 11,61 %.
7. Angka Ketidaklengkapan Pengisian Catatan Medis mencapai 9,8 %.
8. Laboratorium (rata-rata jumlah pemeriksaan per hari) mencapai 1.139 pemeriksaan.
9. Bank Darah (pemenuhan kebutuhan darah rumah sakit) mencapai 100% yang berarti sudah tercukupi pemenuhan kebutuhan darah rumah sakit.



LINGKUNGAN HIDUP

- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sebesar 100% dari jumlah 5 perusahaan wajib AMDAL
- Penegakan hukum lingkungan sebesar 100% dari 1 kasus lingkungan yang ada
- Penanganan sampah sebesar 20,29 % dengan volume 381,3 m³ dari total volume produksi sampah 1.878,8m³.
- Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) perseribu penduduk mencapai 0,25 dengan proporsi jumlah daya tampung TPS 152 m³.

PEKERJAAN UMUM

Kondisi Jalan Kabupaten dan Irigasi Tahun 2016

- panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 83 % atau sepanjang 533,48 km dari total jalan sepanjang 642,75 km,
- proporsi daerah irigasi dalam kondisi baik mencapai 77,88 % atau seluas 16.505,45 hektar dari total daerah irigasi seluas 21.193,45 hektar





PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator Kinerja :

- Tersedianya Dokumen RKPD yg ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017.
- Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD mencapai 108 % atau sejumlah 228 program RKPD dari 220 program yang ada di RPJMD

PENATAAN RUANG



Kinerja penataan ruang terlihat pada ketersediaan Ruang Terbuka Hijau per luas wilayah perkotaan mencapai 7,77 % dengan proporsi Luas RTH 660,958 hektar dari Luas ber HPL/ HGB 8.502,717 Ha.

Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang telah dilaksanakan pembahasan forum BKPRD dalam rangka penerbitan rekomendasi BKPRD sebanyak 38 buah atau meningkat 11,76 % dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 34 rekomendasi. Hal ini mengindikasikan kondisi investasi di Kabupaten Rembang semakin baik

PERUMAHAN



1. Proporsi rumah layak huni mencapai 69,05 % atau sejumlah 124.074 unit dari jumlah seluruh rumah 179.664 unit.
2. Proporsi rumah tangga pengguna air bersih sebesar 79,88 % atau sejumlah 150.000 rumah tangga dari jumlah total rumah tangga 187.783.
3. Proporsi rumah tangga bersanitasi mencapai 80,1 % atau sejumlah 150.018 rumah tangga dari jumlah 150.414 rumah tangga.
4. Rasio rumah ber-IMB mencapai 2,35 % yaitu proporsi jumlah rumah ber-IMB 4.420 unit dari jumlah rumah seluruhnya 187.783 unit.
5. Kawasan Kumuh perkotaan sebesar 0,286 % yaitu proporsi luas kawasan kumuh 290,45 hektar dari total luas permukiman 101.408,035 hektar.



KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Penyelenggaraan urusan bidang kepemudaan dan olahraga diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif dengan karakter kebangsaan yang kuat, guna menciptakan sumber daya manusia yang sportif dan berprestasi

Sarana prasarana yang tersedia di tahun 2016

- Gelanggang/balai remaja milik pemerintah sejumlah 4 buah
- Lapangan olah raga pada mencapai 646 dengan rasio 1,05 per seribu penduduk



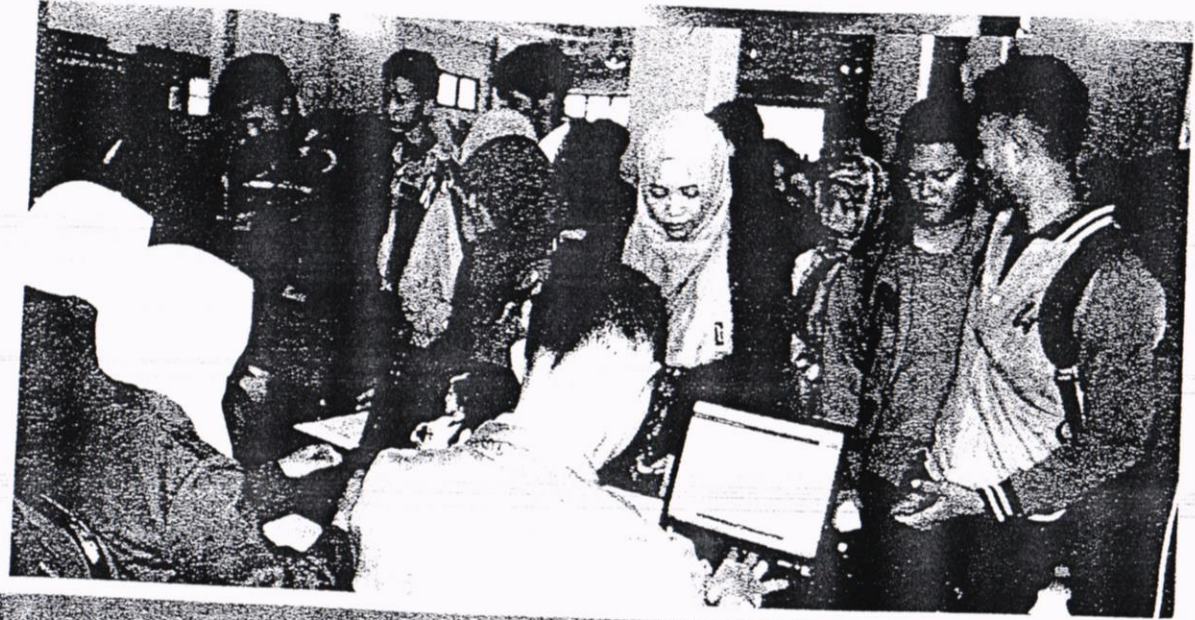
Koperasi dan UMKM

Koperasi dan UKM telah terbukti mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan, sekaligus mampu menjadi soko guru perekonomian nasional dan daerah. Koperasi dan kelompok-kelompok UKM yang ada akan terus kita lakukan penguatan guna mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh.

- Jumlah Koperasi aktif mencapai 294 unit atau 51,72 % dari jumlah koperasi sebanyak 567 unit.
- Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 37.511 atau 95,21 % dari jumlah seluruh UKM sebanyak 39.363 unit

PENANAMAN MODAL

1. Nilai realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mengalami peningkatan sebesar 51,13% yaitu mencapai Rp. 5.006.845.875.108,- dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.313.033.363.082,- .
2. Nilai realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.165.685.052.800,-.



KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

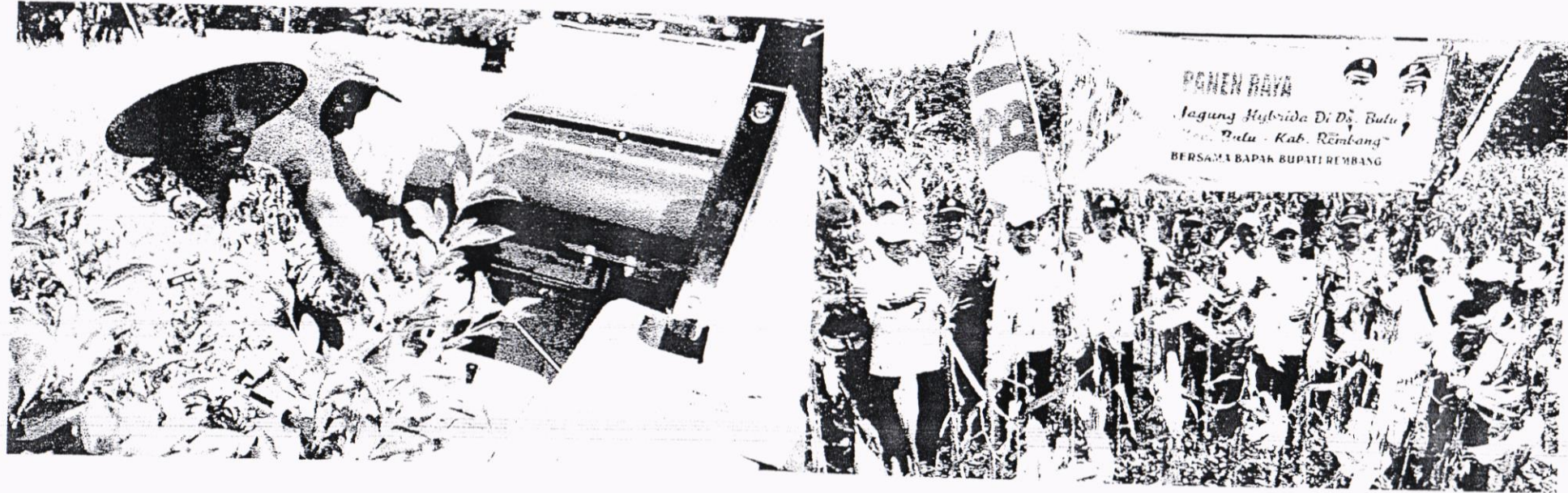
Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk sebanyak 459.482 lembar.

1. Pelayanan Kartu Keluarga sebanyak 55.577 lembar
2. Penerbitan akta kematian sebanyak 1.691 lembar
3. Kepemilikan akta kelahiran sebanyak 10.813 orang



KETENAGAKERJAAN

1. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 51,85% atau sebanyak 322.111 orang dari jumlah penduduk usia kerja.
2. Pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 69% pekerja dari 1.216 pendaftar kerja.



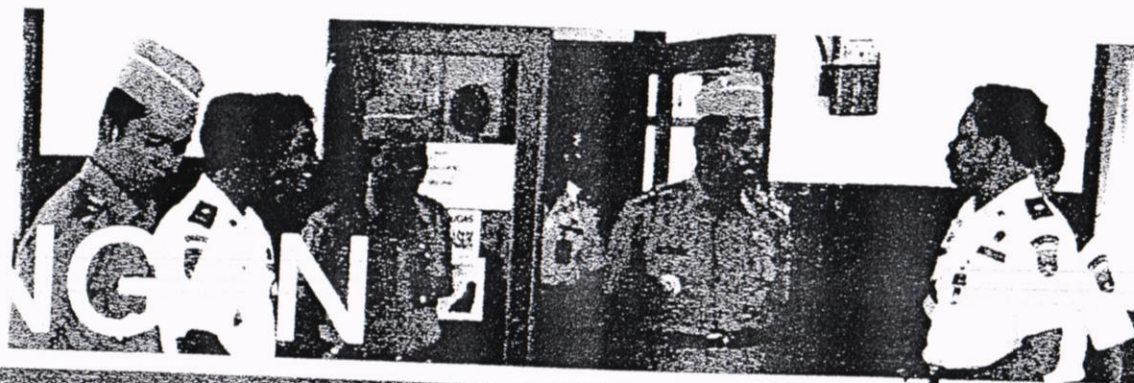
KETAHANAN PANGAN

1. Terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Rembang Nomor 526/0138/2016 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang
2. Ketersediaan pangan utama mencapai 206.694 kg per seribu penduduk.



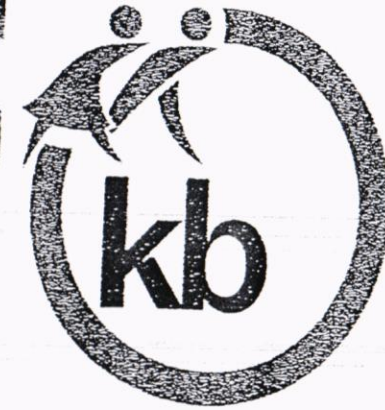
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

1. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan mencapai 2,97% atau 3.454 dari 115.997 pekerja perempuan
2. Angka melek huruf perempuan usia di atas 15 th mencapai 93,81% atau 227.663 dari 242.686 perempuan di kelompok usia tersebut
3. Partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 66,97 % atau mencapai 80.084 dari total 119.583 angkatan kerja perempuan.



No	Jenis Data	TAHUN
		2016
1.	Pelanggaran ijin trayek	8
2.	Pelanggaran uji	29
3.	Pelanggaran kendaraan bukan peruntukannya	0
4.	Kendaraan Bermotor Wajib Uji	7705
5.	Kendaraan Bermotor yang di Uji	9439
6.	Pelanggaran Jalur Penangkapan/pelayaran	-
7.	Pelanggaran Alat Penangkapan Ikan	-
8.	Pelanggaran Pencurian Ekosistem Laut yg dilindungi	-
9.	Pelanggaran Kelengkapan Dokumen Kapal	80
10.	Jumlah Angkutan Darat	1102
11.	Jumlah penumpang angkutan darat	2.295.130
12.	Kecelakaan di Laut	-

KB DAN KELUARGA SEJAHTERA



1. Prevalensi peserta KB aktif mencapai 83,34 % atau 110.377 dari jumlah 132.442 pasangan usia subur
2. Rasio PLKB/PKB mencapai 4,67% atau 67 PLKB melayani 294 desa/kelurahan.





KOMUNIKASI & INFORMATIKA

Kebijakan pembangunan diarahkan pada pengembangan kapasitas sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa, peningkatan kerjasama bidang informasi dan komunikasi, serta peningkatan kualitas bidang informasi dan komunikasi

[http: rembangkab.go.id](http://rembangkab.go.id) (website milik Pemkab Rembang) dan penyelenggaraan Rembang Expo yg rutin dilaksanakan, diharapkan sebagai media komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan globalisasi informasi dalam mendukung pelayanan masyarakat

PERTANAHAN



Kebijakan daerah dlm penyelenggaraan kewenangan di bidang pertanahan diarahkan pada upaya fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, pengendalian fungsi dan peruntukan tanah, serta sinkronisasi program-program pemerintah di bidang pertanahan.

Sampai dengan tahun 2016 presentase bidang tanah yang telah bersertifikat hanya mencapai 37,5 % atau sebanyak 136.926 bidang tanah dari total 365.502 bidang tanah yang ada di Kabupaten Rembang

Upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya sertifikat tanah diwujudkan dengan sertifikasi PRONA sebanyak 4.900 bidang, sertifikasi PRODA sebanyak 100 bidang dan sertifikasi tanah nelayan sebanyak 150 bidang.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DLM NEGERI

Kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri terlihat pada indikator :

- terpeliharanya situasi yg aman dan kondusif pada Tahun 2016
- terwujudnya kemandirian parpol dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat
- meningkatnya fungsi dan peran ormas dalam pembangunan
- meningkatnya kualitas anggota Hansip/Linmas dalam penyelenggaraan ketertiban masyarakat



OTONOMI DAERAH & PEMERINTAHAN UMUM

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum diarahkan pd upaya :

- terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*)
- harmonisasi hubungan antar kecamatan, desa, maupun kelurahan
- koordinasi pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan
- kerjasama daerah
- koordinasi penegakan HAM serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.



FASILITASI HUKUM

- Produk hukum yang ditetapkan pada tahun 2016 berupa 8 Perda, 73 Peraturan Bupati, 1.628 Keputusan Bupati

Perekonomian Daerah

- Distribusi beras miskin (raskin) di Kab. Rembang pd tahun 2016 mencapai 12.422,52 ton beras dengan jumlah penerima sebanyak 69.014 RTSM
- Penyertaan modal sebesar 12,27 milyar rupiah ke beberapa BUMD dan Bank Jateng.
- Deviden yang diterima Pemkab Rembang pada tahun 2015 mencapai 6,56 milyar rupiah.





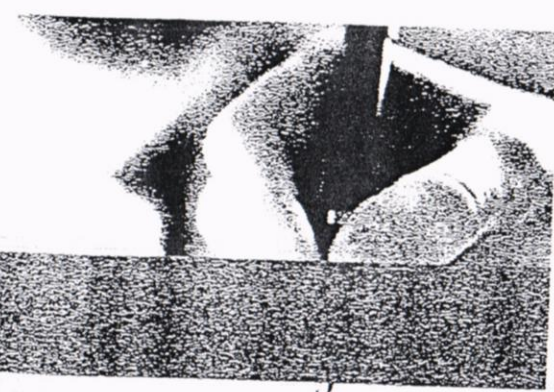
PENGAWASAN DAERAH

1. Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sebesar 83,43% atau sebanyak 423 dari total 507 rekomendasi.
2. Pemeriksaan kasus dan pemeriksaan khusus sebanyak 171 kasus dari target 177 Kasus dan pemeriksaan reguler Kabupaten Rembang sebanyak 109 dari target sebanyak 144 obyek pemeriksaan.



pengendalian program pembangunan daerah

1. Terselenggaranya bimbingan teknis/sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang diikuti 50 orang peserta, dengan jumlah peserta lulus sertifikasi 13 orang. Hingga tahun 2016 terdapat 242 PNS yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa;
2. Terlaksananya pemilihan penyedia barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP);
3. Terbitnya 137 Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).



Pemerintahan Umum

1. Terpenuhinya kewajiban pemerintah daerah melaporkan kinerja kepada Pemerintah, DPRD dan masyarakat.
2. Tersalurkannya dana desa dan ADD untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Terjalinya kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten sekitar dan Kerjasama Kawasan RATUBANGNEGORO.



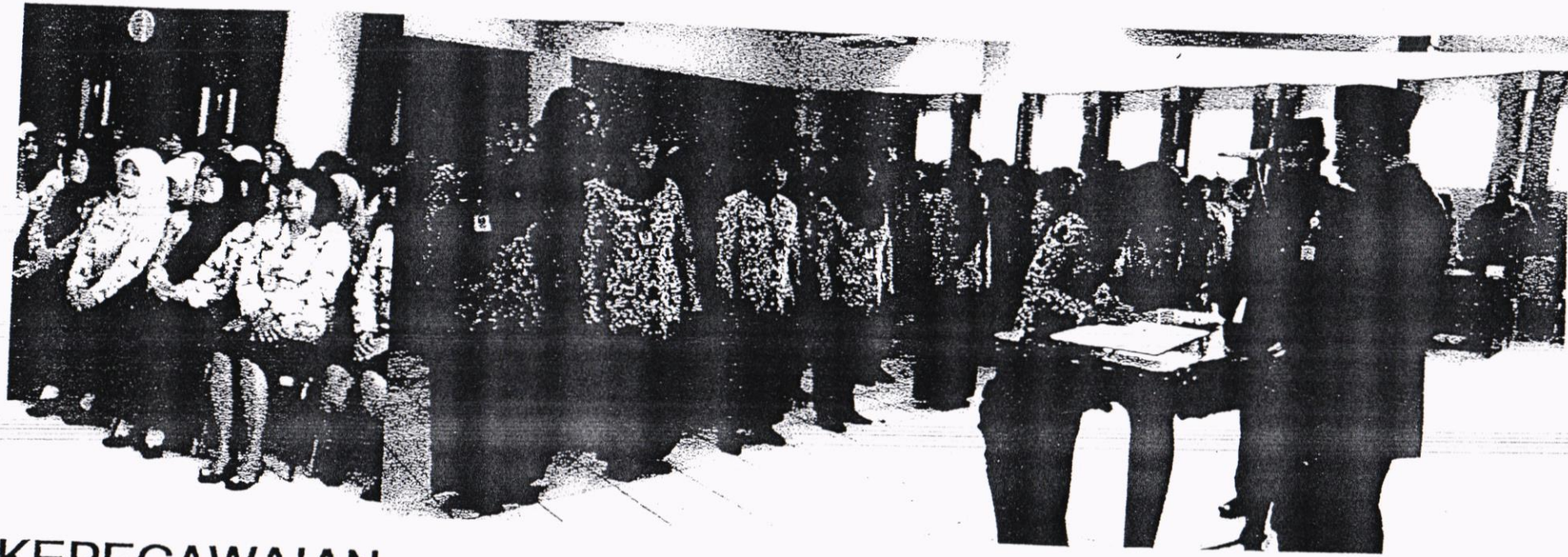
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH & ASET DAERAH

1. Belanja untuk pelayanan dasar mencapai 60,53% dari total realisasi belanja APBD Tahun 2016.
2. Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan mencapai 45,60% dari total realisasi belanja APBD Tahun 2016.
3. Rasio PAD terhadap total pendapatan APBD tahun 2016 sebesar 15,07%.



PERANGKAT DAERAH

Jumlah urusan wajib yang sudah diterapkan SPM berdasarkan penetapan oleh menteri/Pimpinan LPND sebanyak 12 urusan, yaitu urusan pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Penanaman Modal, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Ketenagakerjaan, Ketahanan pangan, Komunikasi dan Informatika, Kebudayaan dan Pemerintahan dalam negeri.



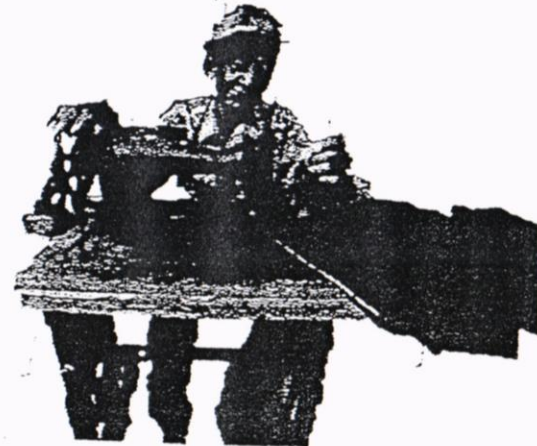
KEPEGAWAIAN

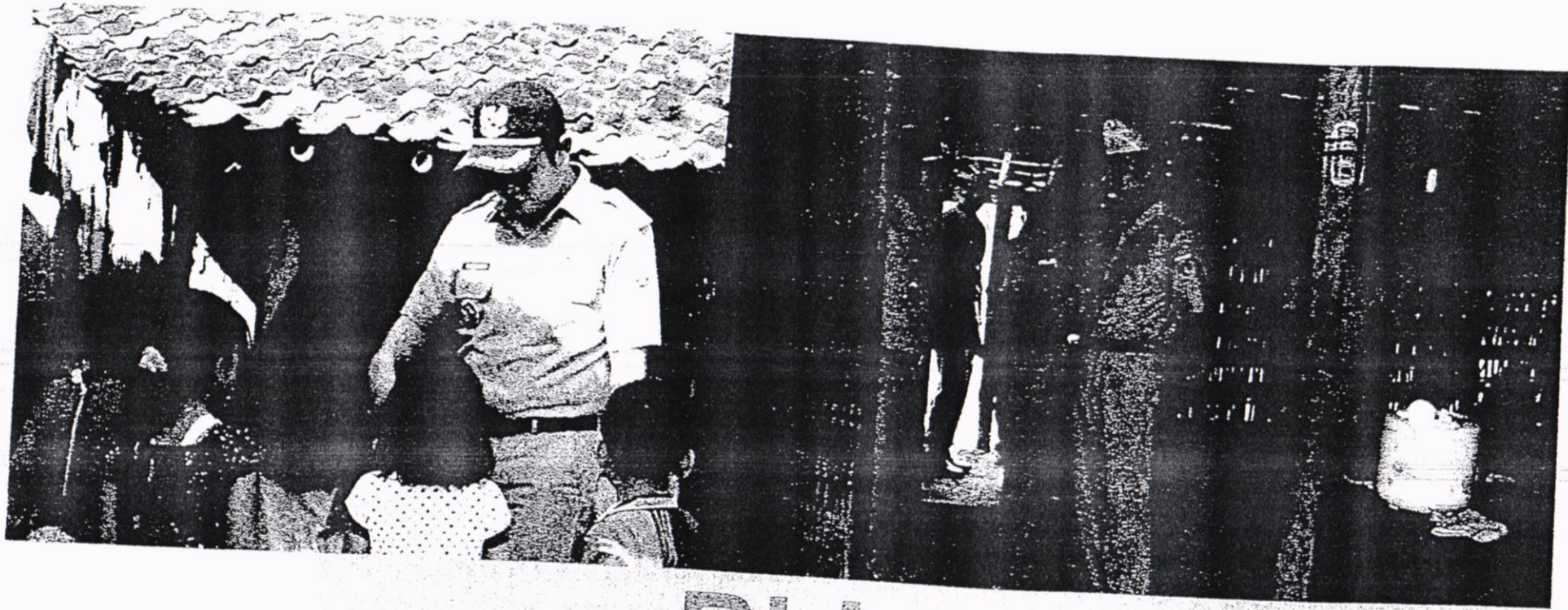
1. Jumlah PNS per 31 Desember Tahun 2016 mencapai 7217 orang
2. Pelaksanaan beberapa kegiatan yang krusial berjalan dengan lancar yaitu seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (sekretaris daerah) yang melalui Pansel dan Assesment berjalan dengan tertib, transparan dan sangat baik
3. Rasio PNS sebesar 1,16 %.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kebijakan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan pada upaya memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif, serta meningkatkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat

- PKK aktif mencapai 100% dari jumlah 309 PKK yg ada
- Posyandu aktif mencapai 100% dari jumlah 1.225 posyandu yg ada





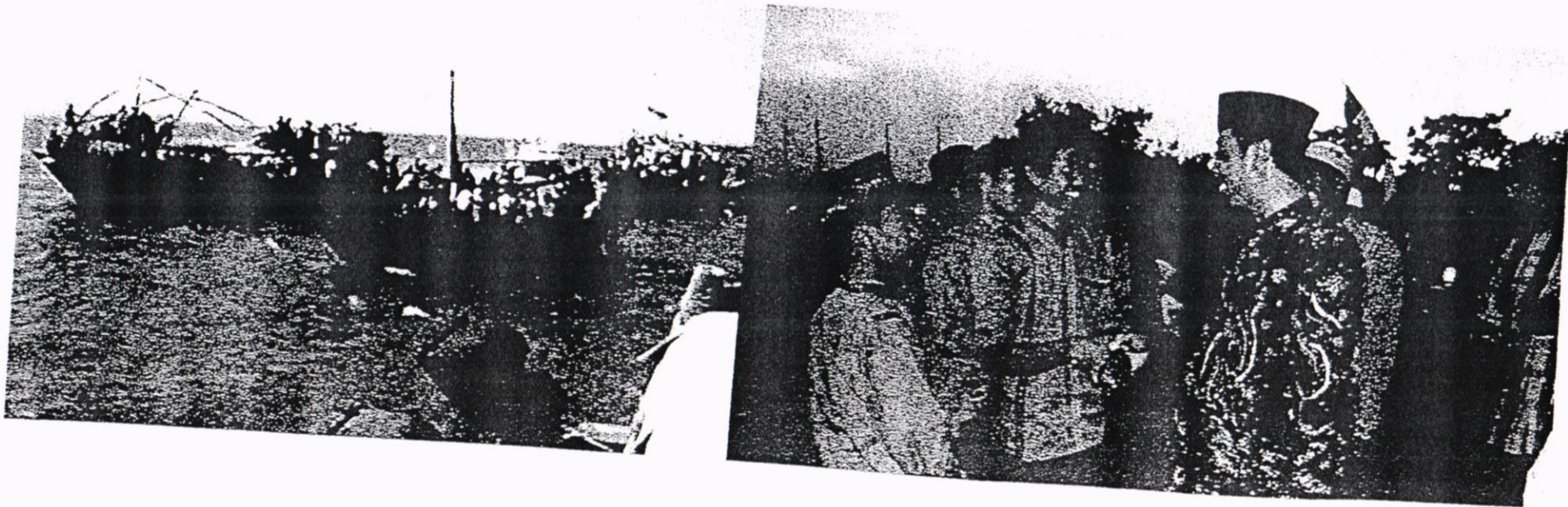
Bidang SOSIAL

1. Jumlah sarana sosial sebanyak 10 buah (panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi).
2. Penanganan penyandang kesejahteraan sosial sebesar 5,59% dari 145.683 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial/PMKS.

BID. KEBUDAYAAN

Kebijakan pembangunan bidang kebudayaan diarahkan pd upaya meningkatkan, mengembangkan dan melestarikan pengelolaan nilai, kekayaan dan keragaman budaya daerah; meningkatkan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya daerah; meningkatkan dan mengembangkan pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME

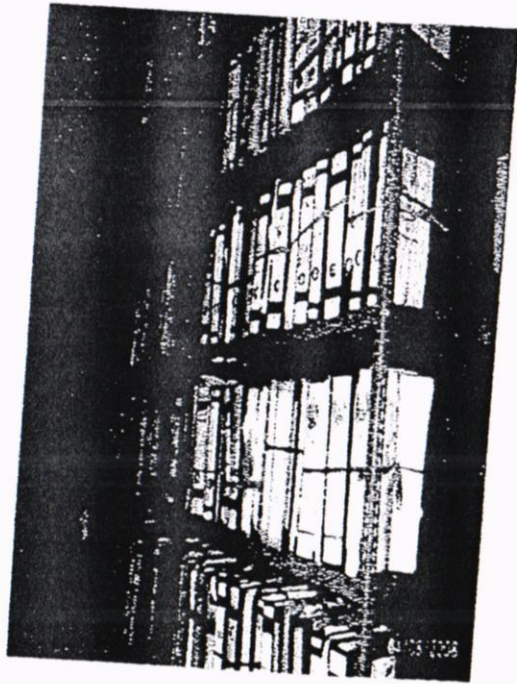
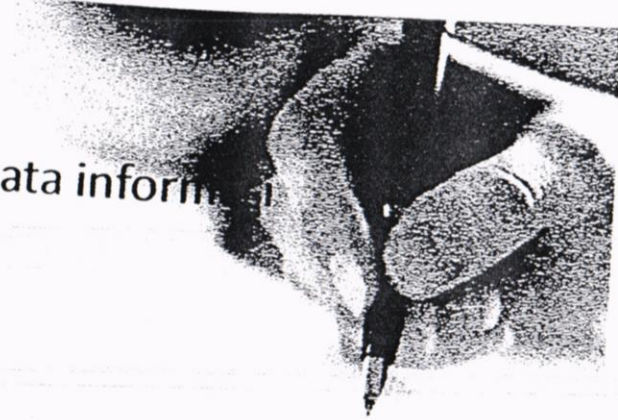
- penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 3 kali
- benda, situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan sebanyak 37 buah



BIDANG STATISTIK

Dilaksanakan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

- Rembang Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka,
- PDRB Kab. Rembang,
- Indikator Sosial Ekonomi,
- Analisis kemiskinan Kabupaten Rembang
- Indek kesejahteraan Petani



BIDANG KEARSIPAN

Program yang dilaksanakan berupa Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, Program Pengkajian serta Program Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan

- ✓ Penerapan pengelolaan arsip secara baku di SKPD mencapai 38,29 % (18 dari 49 unit SKPD) dan sebanyak 12,24% dari total Pemerintahan Desa.



BIDANG PERPUSTAKAAN

1. Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 48,94% dari jumlah koleksi buku yang tersedia sebanyak 31.490 buku.
2. Pengunjung perpustakaan mencapai 14.211 orang dalam setahun.



KELAUTAN & PERIKANAN

Hasil pembangunan bidang kelautan dan perikanan telah dirasakan mengalami perkembangan positif yang terindikasi dari capaian kinerja. Produksi perikanan laut mencapai 60.894,2 ton dengan nilai raman Rp. 412,03 milyar serta produksi perikanan darat yg mencapai 7.477,23 ton.

PERTANIAN

Total produksi padi sebesar 152.822 ton dengan luas panen mencapai 34.309 hektar.



KEHUTANAN



Pembangunan di bidang kehutanan diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan sebagai upaya peningkatan daya dukung DAS dan menjaga kelestarian sumberdaya hutan dengan melibatkan potensi masyarakat di sekitar hutan.

Pada tahun 2016, seluas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi seluas 485 ha atau sekitar 9,07 % dari total hutan dan lahan kritis seluas 5.345 ha.

Luas kerusakan kawasan hutan secara maksimal dapat ditekan dibawah 0,60 % atau hanya seluas 173,30 ha dari total Kawasan Hutan seluas 28.661,27 ha.

ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL



Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kab. Rembang, pada kenyataannya masih menunjukkan kontribusi dalam perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja, penyediaan bahan baku industri, bahan bakar domestik dan memacu efek berantai ekonomi lain.

Namun demikian, berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menarik hampir keseluruhan kewenangan pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke tingkat Provinsi.

Dengan perubahan fundamental dalam kewenangan tersebut, pemerintah daerah telah mempersiapkan langkah awal dengan upaya meningkatkan efisiensi sektor ESDM disamping terus mencari teknologi dan sumber-sumber energi alternatif yang murah.

PARIWISATA



Upaya mendorong perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang menuju era industri pariwisata perlu lebih ditekankan untuk menangkap sejumlah peluang investasi dlm rangka mengoptimalkan penataan obyek wisata, mengatasi kurangnya sarana promosi, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan serta kualitas SDM pariwisata

- jumlah pengunjung obyek wisata mencapai 1.218.793 orang,
- pendapatan obyek wisata sebesar Rp. 2,25 Milyar.



INDUSTRI

- Jumlah industri hingga tahun 2016 mencapai 12.171 unit , tumbuh sebesar 1,17 % dari tahun sebelumnya (12.030 unit).
- Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 21,27 % dengan nilai nominal sebesar Rp. 2,3 trilyun.



PERDAGANGAN

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rembang yang mencapai 13,50 % dengan nilai nominal sebesar Rp 1,46 trilyun. Sedangkan Ekspor Bersih Perdagangan sebesar US\$ 25.471.834,04 dari nilai ekspor sebesar US\$ 25.928.399,81 dan nilai impor sebesar US\$ 456.565,77.

TRANSMIGRASI



Kebijakan pembangunan bidang transmigrasi diarahkan pada upaya meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi.

Pada tahun 2016 dilaksanakan program pengembangan wilayah transmigrasi yg diwujudkan dengan kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, serta rekrutirng calon transmigran.

Dengan segenap pencapaian serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, Kita patut berbangga dg berbagai bentuk apresiasi berupa sejumlah penghargaan yg diterima Pemkab Rembang pada tahun 2016 diantaranya :



1. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2016.
2. Penghargaan peduli perpustakaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kabupaten Rembang merupakan satu dari 83 Kabupaten yang dinilai berhasil mengembangkan dan memiliki kepedulian terhadap perpustakaan di daerah.





4. Pengarugeração Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016, Penghargaan sebagai Kabupaten Transparansi Informasi Publik peringkat ke-6 di Jawa Tengah.
5. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Mentor. Kategori Mentor merupakan tingkatan kategori tertinggi.
6. Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2016 Kategori Lalu lintas Kota Kecil Tingkat Nasional.



TERIMA KASIH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (II) INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI OLEH KOMISI- KOMISI DPRD ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

Hari : KAMIS
Tanggal : 20 April 2017
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
 1. Pembukaan;
 2. Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi- Komisi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016;
 3. Persetujuan terhadap Usul Rekomendasi oleh Komisi- Komisi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016;
 4. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
 1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang
- V. **SEKRETARIS RAPAT**
 1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 3 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 31 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	: 14 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.

Sebagai insan yang bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa marilah untuk senantiasa kita selalu bersyukur kehadiran-Nya, karena atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini Kamis tanggal 20 April 2017 kita dapat bertemu untuk melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 dengan agenda pokok Penyampaian Usul Rekomendasi komisi-komisi dan persetujuan terhadap usul rekomendasi.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir pada rapat paripurna hari ini adalah sebanyak 31 orang.

Keabsahan kuorum pada Rapat Paripurna ini adalah sama dengan yang berlaku dalam Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 17 April kemarin, yakni dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

Dengan demikian Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 13.05 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan yang terhormat,

Untuk selengkapnya akan saya sampaikan susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan.
2. Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi-Komisi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016;
3. Persetujuan Terhadap Usul Rekomendasi Komisi-Komisi Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016;
4. Penutup.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Mari kita masuki acara yang kedua, yaitu Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi-Komisi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016. Agar dalam penyampiannya dapat berjalan tertib, maka kepada wakil dari masing-masing Komisi yang ditunjuk sebagai juru bicara, saya minta untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Juru Bicara Komisi A | : Sdr. Muhammad Anshori |
| 2. Juru Bicara Komisi B | : Sdr. Ali Ircham, S.T. |
| 3. Juru Bicara Komisi C | : Sdr. Mugiyarto, S.T. |
| 4. Juru Bicara Komisi D | : Sdr. Ilyas |

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari Juru Bicara Komisi A dipersilakan.

**===== PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI
MASING –MASING KOMISI =====**

➤ *(Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi-Komisi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 terlampir)*

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing Komisi atas penyampaianannya.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Demikian baru saja disampaikan usul rekomendasi dari masing-masing komisi atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016. Sebelum usul rekomendasi dari masing-masing komisi ini ditetapkan menjadi Rekomendasi DPRD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Rembang kedepan, maka perlu persetujuan dari rekan – rekan yang hadir dalam Rapat Paripurna ini.

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Ini begini sebelum persetujuan saya tawarkan ini dalam usulan rekomendasi Komisi B atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 ada juga catatan terkait penolakan atas Permen No. 71 Tahun 2016 terkait penggunaan alat tangkap Cantrang. Ini kan tidak ada hubungannya dengan LKPJ/ diluar pembahasan LKPJ. Nah ini saya tawarkan kepada temen – temen apakah ini disetujui atau tidak ???”

➤ Gatot Paeran, S.H., M.Si.(Fraksi Karya Sejahtera)

“ Maksud kami begini Gus, jika Komisi B sudah sepakat tentang catatan itu ya sebaiknya disampaikan pada even lain saja, kan tidak ada hubungannya dengan LKPJ Gus.”

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Iya saya tahu, maksud saya apakah catatan tentang pernyataan sikap Komisi B ini kita sepakati atau tidak ???Ini kan boleh disampaikan disini. Coba pendapat yang lain”

- Muh. Asnawi, S.Pd.I. (Fraksi PKB)
 - “ Menurut saya ini kan hanya pernyataan sikap Gus bukan rekomendasi atas LKPJ jadi tidak perlu persetujuan.”
- H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)
 - “ Bener itu bukan rekomendasi tapi apakah catatan dari Komisi B ini perlu kita tindaklanjuti atau gimana???Monggo Pak Joko ini Kronologisnya bagaimana ?”
- H. Joko Supriyadi, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)
 - “ Begini Gus kronologisnya, kemarin pada hari selasa Komisi B menerima audiensi dari Paguyuban para nelayan cantrang Kabupaten Rembang, dan mereka meminta kepada kita sebagai wakil rakyat agar DPRD untuk menolak PP tersebut secara institusi/ kelembagaan pada rapat paripurna istimewa hari selasa.”
- Gatot Paeran, S.H., M.Si.(Fraksi Karya Sejahtera)
 - “ Maaf Gus kalau saya kurang setuju jika kita menanggapi pernyataan sikap tersebut secara institusi, soale berarti kita kan menentang peraturan dari pusat, kita harus hati- hati Gus. Terima Kasih”
- Muh. Bahaud Duror, S.PI.(Fraksi PDI Perjuangan Nasdem)
 - “ Bagi saya secara mekanisme saya juga kurang setuju jika pernyataan sikap tentang PP tersebut disetujui secara institusi”
- Zaimul Umam NS(Fraksi PPP)
 - “ Sebenarnya masalah pernyataan sikap itu kami semua setuju- setuju saja ini soalnya masalah perut juga toh gak kan ada efeknya tapi mohon redaksinya diganti jangan penolakan tetapi keberatan atas PP tersebut”
- Eka Siswa Kartika (Fraksi Demokrat)
 - “ Ini maaf Gus, saya saya setuju dengan pernyataan sikap tentang keberatan PP tersebut. Tetapi untuk pernyataan sikap DPRD secara institusi agar di agendakan acara tersendiri, jadi kita fokus pada LKPJ dulu Gus. Terima Kasih.”
- Ilyas (Fraksi PKB)
 - “ Menurut saya Gus saya setuju dengan apa yang yang dikehendaki oleh paguyuban nelayan itu soal pernyataan sikap penolakan atas PP cantrang tapi kalau pernyataan penolakan secara institusi kita harus pelajari dahulu soal tersebut, drafnya,dasar hukumnya. Terima kasih.

➤ H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat)

“ Ini sudah ada 2 orang yang kurang setuju jika pernyataan sikap atas PP ini disetujui secara kelembagaan. Jadi kita bawa dulu ke Pimgab dulu ya?? Setuju???”

➤ Semua anggota DPRD yang hadir menjawab

“ Setujuuuu....!!!!!!”

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara:

” Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan oleh Komisi A dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? “

===== *Setujuuu ...!!!* =====

*(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)*

” Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan oleh Komisi B dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? “

===== *Setujuuu...!!!* =====

*(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)*

” Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan oleh Komisi C dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? “

===== *Setujuuu....!!!!* =====

*(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)*

” Apakah Usul Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 yang disampaikan oleh Komisi D dapat disetujui menjadi Rekomendasi DPRD??? “

===== Setujuuu !!! =====

*(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)
(Ketuk palu 1 kali)*

Rapat Dewan yang berbahagia,

Agenda pokok dalam rapat paripurna telah kita lewati, maka selesailah sudah Rapat Paripurna hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

Akhirnya dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 14.00 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



KETUA,

H. MAJID KAMIL MZ



SEKRETARIS,

Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) INTERNAL DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYAMPAIAN
USUL REKOMENDASI OLEH KOMISI- KOMISI
DPRD ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2016**

LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;

LAMPIRAN II : Penyampaian Usul Rekomendasi oleh Komisi-
Komisi DPRD Atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Rembang Akhir
Tahun Anggaran 2016 ;

DAFTAR

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG PENYAMPAIAN USUL REKOMENDASI KOMISI KOMISI

ATAS LKPJ BUPATI REMBANG TA. 2016

HARI/TANGGAL : KAMIS , 20 APRIL 2017

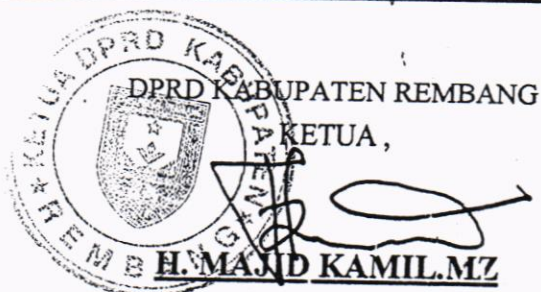
PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd. ,M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. F. ARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHCLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUIHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

NO	N A M A	J A N I S	TANDA TANGAN	KET
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, S.PI.	Anggota	32	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41	
FRAKSI HARAPAN				
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	
44	PAKAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM MENYUSUN REKOMENDASI ATAS LKPJ AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2016**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Mengawali penyampaian laporan hasil pembahasan Komisi A DPRD Kabupaten Rembang dalam menyusun rekomendasi atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016, kami tiada lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan tugas pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang dengan baik.

Adapun Laporan Hasil Pembahasan Komisi A DPRD Kabupaten Rembang selengkapnya sebagai berikut :

I. Pelaksanaan :

1. Hari : Selasa s/d Rabu
2. Tanggal : 18 s/d 19 April 2017
3. Tempat : Ruang Komisi A
4. Dihadiri : Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Rembang
5. Pimpinan Rapat : Muh. Asnawi, S.Pd.I./ Ketua Komisi A

II. Hasil Rapat

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Rembang adalah momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mengukur capaian kinerja pada tahun pertama berjalan.

Oleh sebab itu harusnya dokumen LKPJ Akhir yang disajikan tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas melainkan menjadi pertanggung jawaban yang obyektif dan jujur.

Pembenahan dan perbaikan dokumen yang justru DPRD harapkan ke depan agar sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun

2007, dimana disajikan per urusan per OPD secara berurutan dan sistematis yang lebih tepat disajikan oleh BAPPEDA tidak di Bagian Tata Pemerintahan.

2. Merujuk pada Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (3) dan juga merujuk pada PP Nomor : 45 Tahun 2007 Pasal 14 yang menjelaskan bahwa Sekretaris Desa PNS bisa dimutasikan setelah menjalani masa jabatan minimal 6 (enam) tahun.

Bahwa di sisi lain UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan peluang pada Sekretaris Desa PNS untuk memilih antara tetap menjadi perangkat atau mengajukan pindah tugas.

Oleh sebab itu Komisi A merekomendasikan agar Saudara Bupati segera membuat terobosan atau membuat Surat Keputusan supaya Sekdes-Sekdes PNS dipindah/dimutasi ke beberapa OPD sesuai dengan jenjang kepangkatan dan golongannya seperti Kabupaten-kabupaten yang lain.

Mengingat banyak sekali ditemukan di lapangan Sekretaris Desa tidak bisa bekerja sama dengan Kepala Desa.

3. Bahwa saat ini, di Kabupaten Rembang secara umum terjadi kekurangan Perangkat Desa, banyak desa dimana Kepala Desanya mengeluh karena kurang optimalnya dalam bekerja dikarenakan kekurangan perangkat, ada juga yang Perangkat Desanya cukup tapi kondisi usia sudah lanjut.

Seiring dengan beban kerja desa yang harus mempertanggung jawabkan Dana Desa yang cukup besar Milyaran Rupiah tentu dibutuhkan SDM yang cukup dan memadai.

Oleh sebab itu agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera bertindak membuat regulasi Peraturan Bupati tentang pengisian perangkat yang tidak perlu terus berkutat soal status desa.

Harus berani segera membuat terobosan hukum seperti Kabupaten-kabupaten yang lainnya.

Demikian laporan hasil rapat Komisi A DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 selanjutnya sebagai bahan Rekomendasi Keputusan DPRD tentang LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Rembang.

WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

Rembang, 19 April 2017

KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muh. Asnawi', written over a horizontal line.

MUH. ASNAWI, S.Pd.I.

Sekretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mohammad Anshori', written over a horizontal line.

MOHAMMAD ANSHORI

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI B DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MENYUSUN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

Yang kami hormati ketua, wakil ketua, dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Mengawali penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang dalam menyusun Rekomendasi atas LKPJ Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Akhir Tahun Anggaran 2016, kami tidak lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan tugas pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang dengan baik.

Adapun Laporan Hasil Pembahasan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang selengkapnya adalah sebagai berikut ;

DASAR HUKUM :

- A. Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Rembang No. 130/ 04/0620/2017 Tanggal 27 Maret 2017 perihal penyampaian LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2016.
- B. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang Tanggal 3 April 2017

PELAKSANAAN :

- a. Jenis rapat : Rapat kerja Komisi B
- b. Tentang : Pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016
- c. Hari : Selasa s/d Rabu
- d. Tanggal : 18 s/d 19 April 2017
- e. Waktu : 10.00 WIB s/d selesai
- f. Tempat : Ruang Komisi B
- g. Di hadiri oleh : Pimpinan dan Anggota Komisi B
- h. Pimpinan Rapat : IMRO'ATUS SHOLICHAH, S.E, M.M

HASIL RAPAT dan REKOMENDASI :

Setelah mendalami dan mempelajari atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016, Komisi B DPRD Kabupaten Rembang masih perlu merekomendasikan beberapa hal sebagaimana berikut :

REKOMENDASI

1. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021, LKPJ Akhir Tahun 2016 belum menunjukkan terwujudnya masyarakat Rembang yang sejahtera, melalui peningkatan perekonomian dan sumber daya manusia, yang dilandasi semangat kebersamaan, pemberdayaan Masyarakat dan kewirausahaan. Karena tidak ada laporan data indikator makro ekonomi dan sosial, juga tidak ada laporan capaian kinerja Tahun 2016.
2. Belum terintegrasinya kebijakan Bupati dengan OPD secara bulat, sehingga APBD tidak dapat terserap secara maksimal khususnya di OPD Indagkop dan UMKM yang berjalan sendiri terkait pemberdayaan UMKM yang berbasis kerakyatan di khawatirkan kalau tidak ada perbaikan visi dan misi Bupati atas hal tersebut tidak akan dapat tercapai.

HASIL /CATATAN ;

Dengan diberlakukanya Permen No. 71 Tahun 2016 di rasa memberatkan nelayan di Kabupaten Rembang terkait penggunaan alat tangkap Cantrang, maka Pemerintah Daerah diharapkan untuk memperjuangkan nasib para nelayan cantrang.

- a. Pada tahun 2011 Pemerintah mengeluarkan permen kp No. 2 Tahun 2011 yang berisi diantaranya ijin kapal cantrang beroperasi bahkan memberikan wilayah tangkap di wpp 711, wpp 712 dan wpp 713.
- b. Ketika alat tangkap cantrang di larang beroperasi pada waktu di berlakukanya permen kp No. 2 Tahun 2015, perekonomian di Kabupaten Rembang mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal itu bisa di lihat dari hasil pengawasan ke beberapa pusat perbelanjaan baik di pertokoan maupun pasar tradisional.
- c. Pada Tahun 2016 Pemerintah mengganti Permen No. 2 Tahun 2015 menjadi Permen Kp No. 71 Tahun 2016 yang melarang beroperasinya alat tangkap cantrang.
- d. Pada masa peralihan Tahun 2016 ke Tahun 2017 para nelayan cantrang tidak berani melaut terkait dengan di berlakukanya Permen No 71 Th 2016, hal ini juga mengakibatkan perekonomian di Kabupaten Rembang menjadi menurun. Berdasarkan pengawasan di lapangan paguyuban pasar Rembang juga sepi karena larangan cantrang, hal ini juga di alami pengusaha toko laut Bonang satu bulan terakhir ini mengalami rugi Rp. 90 Juta hanya untuk mengaji karyawanya dengan alasan usahanya sepi karena cantrang dilarang beroperasi.
- e. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 pembentukan Permen kp No. 71 Tahun 2016 tidak memenuhi prosedur perundangan yang baik karena

tidak melibatkan pemangku kepentingan termasuk oleh para nelayan cantrang.

- f. Pada awal tahun 2017 Pemerintah mengeluarkan S E KP NO. B1/sj/pl.610/1/2017 yang berisi diantaranya Pemerintah membuat Pokja yang bertugas sebagai pendamping nelayan untuk mengganti alat tangkap cantrang, namun hingga saat ini kerja dari Pokja tersebut belum bisa di rasakan oleh para nelayan cantrang.
- g. Untuk mengganti alat tangkap cantrang dengan alat tangkap yang di ijinakan oleh Pemerintah, Nelayan cantrang masih membutuhkan anggaran tak kurang dari 3 Milyard dan nelayan tidak mampu mencari anggaran sebesar itu.

Dari kajian tersebut diatas, maka kami mengambil sikap untuk menolak diberlakukanya Permen KP NO. 71 Tahun 2016, dan Pemerintah Khususnya Kementrian Perikanan dan kelautan untuk mengijinkan kapal cantrang tetap beroperasi di wilayah perairan Kesatuan Republik Indonesia.

PENUTUP

Demikian hasil laporan pembahasan Komisi B DPRD Kabupaten Rembang atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sebagai bahan Rekomendasi Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016.

WASSALAMU ALAIKUM WR. WB.

REMBANG, 19 April 2017
KOMISI B DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,

Sekretaris,

IMRO'ATUS SHOLICHAH, S.E,M.M

ALI IRCHAM , S.T

LAPORAN RAPAT HASIL PENYUSUNAN
REKOMENDASI KEPUTUSAN DPRD ATAS LKPJ BUPATI REMBANG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
KOMISI : C

A. Dasar :

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 130.04/0620/ 2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Penyampaian LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2016.
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 3 April 2017.

B. Pelaksanaan :

1. Hari/ Tanggal : Selasa , tanggal 18 April 2017
2. Tempat : Ruang Komisi C DPRD Kabupaten Rembang
3. Hadir dalam Rapat : Pimpinan dan anggota Komisi C bersama OPD terkait
4. Pimpinan Rapat : WIDODO

C. Hasil Rapat :

Secara umum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 dapat dipahami dan diterima, namun perlu direkomendasi sebagai berikut:

1. Melihat dari Buku LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2016 pada Buku I halaman 22, dilaporkan bahwa jalan dalam keadaan baik mencapai (83 %) atau sepanjang 533,48 km dan menurut pengamatan/ pantauan Komisi C hanya berkisar sekitar (49 %) hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Untuk itu mohon dalam membuat laporan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada.
2. Mohon untuk tahun anggaran mendatang dalam tahapan perencanaan kegiatan (kegiatan dengan anggaran yang besar) agar direncanakan pada tahun sebelumnya/ (T-1) supaya pada awal tahun anggaran baru kegiatan bisa segera berjalan dan kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun.
3. Kurangnya kawasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Rembang, untuk itu kedepan Pemerintah Kabupaten Rembang harus menyediakan anggarannya dan lokasinya.
4. Perlunya penanganan masalah kebersihan dan persampahan yang menyeluruh di Kabupaten Rembang, untuk itu agar Pemkab Rembang mencari solusi dan tindakanya, sehingga Kabupaten Rembang bisa meraih Adipura kembali.

Demikian Laporan hasil rapat Komisi C dalam membahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 dan selanjutnya sebagai bahan Rekomendasi Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 pada Rapat Paripurna Istimewa tanggal 25 April 2017.

Rembang, 18 April 2017

KOMISI C

DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,

Sekretaris,



WIDODO

NUR JANNAH

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI D DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM MENYUSUN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016.**

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.

Sebelum kami bacakan laporan hasil pembahasan dari Komisi D pada hari ini, marilah sejenak kita menunduk, bertafakur seraya memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran-Nya, atas semua limpahan rohmah, nikmat dan hidayah serta kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu apa (Amiin ya robbal alamin).

Selanjutnya Komisi D DPRD Kabupaten Rembang akan melaporkan hasil rapat sebagai berikut :

A. Dasar:

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor: 130.04/0620/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Penyampaian LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2016
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 3 April 2017.

B. PELAKSANAAN :

1. Hari / Tanggal : Selasa s/d Rabu, 18 s/d 19 April 2017
2. Tempat : Ruang Komisi D
3. Peserta Rapat : Pimpinan dan Anggota Komisi D
4. Pimpinan Rapat : Ilyas (Wakil Ketua Komisi D)

C. HASIL RAPAT

Setelah kami cermati maka bisa kami sampaikan bahwa dokumen LKPJ Tahun 2016 ini pada Bab IV dalam penyajiannya belum sesuai dengan harapan kami sehingga capaian kinerja masing-masing urusan (OPD) belum bisa diukur. Kedepan kami berharap dokumen LKPJ disesuaikan dengan PP Nomor 3 Tahun 2007. Selanjutnya ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan untuk bisa ditindaklanjuti supaya ada peningkatan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Bidang Kesehatan

1. Terakait dengan program BLUD di masing-masing Puskesmas Kab. Rembang kami minta DKK untuk mengawal secara serius, mengevaluasi secara berkala terhadap kemampuan dan kesiapan Puskesmas dalam menjalankan program BLUD apabila dianggap tidak mampu menjalankan program tersebut kami merekomendasikan untuk ditinjau ulang kebijakan BLUD pada puskesmas.
2. Semakin meningkatnya penderita HIV/AIDS di Kabupaten Rembang Komisi D merekomendasikan agar pemerintah daerah membuat program khusus untuk menangani permasalahan tersebut.

b. Bidang Pariwisata

1. Untuk memajukan potensi wisata Rembang dan menjadikan Dinas Pariwisata menjadi Dinas Unggulan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang, maka perlu adanya strategi khusus tentang pemasaran potensi wisata di Kabupaten Rembang dengan diimbangi adanya pengelolaan yang baik dan SDM yang profesional.

2. Banyaknya potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Rembang yang masih belum dikembangkan diharapkan agar Pemerintah Daerah lebih kreatif dalam menggali potensi wisata, sehingga dapat meningkat industri pariwisata yang ada di Rembang dan berdampak pula pada peningkatan PAD pada sektor pariwisata dan peningkatan perekonomian dimasyarakat.

c. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

1. Agar pemerintah daerah meningkatkan anggaran untuk menggali dan mengkaji secara mendalam terkait dengan sejarah yang ada di Kabupaten Rembang yang diharapkan dapat menambah khasanah budaya Kabupaten Rembang.

D. PENUTUP

Demikian Laporan yang kami sampaikan atas hasil rapat internal Komisi D DPRD Kabupaten dalam menyusun rekomendasi atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016, yang selanjutnya sebagai bahan rekomendasi Keputusan DPRD tentang LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016.

Rembang, 19 April 2017
KOMISI D DPRD KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua



ULYAS

Sekretaris



ISLAHUDDIN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (III) ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD ATAS LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

Hari : SELASA
Tanggal : 25 April 2016
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang

II. SIFAT RAPAT : Terbuka

III. ACARA RAPAT:

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Rekomendasi Atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016;
3. Penyerahan Rekomendasi secara Simbolis oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati Rembang;
4. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	: 36 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Demokrat	: 1 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 3 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	: 9 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan

menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 36 orang. Sehubungan Rapat Paripurna Istimewa tidak mengambil keputusan, dimana dalam pelaksanaanya tanpa memperhitungkan jumlah kehadiran anggota, maka dengan mengucapkan *"Bismillaahirrohmaanirrohiim"* tepat pukul 12.10 WIB Rapat Paripurna Istimewa hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Untuk selanjutnya akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna istimewa hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016;
3. Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 secara simbolis oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati Rembang;
4. Penutup.

Marilah kita masuki acara kedua, yang merupakan agenda pokok dalam rapat paripurna hari ini yaitu **Pembacaan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016.**

Perlu kami sampaikan bahwa , Keputusan DPRD ini merupakan hasil dalam Rapat Paripurna Internal DPRD pada tanggal 20 April 2017, yang mana usul rekomendasi dari masing – masing komisi, baik Komisi A, Komisi B, Komisi C maupun Komisi D dapat disetujui oleh anggota menjadi Rekomendasi

DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016.

Untuk selanjutnya, saya mohon kepada Saudari Sumarsih dapat berkenan membacakan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud.

Waktu dan tempat dipersilahkan.

**====PEMBACAAN KEPUTUSAN DPRD ATAS LKPJ BUPATI AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2016 =====**

➤ *(Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016 terlampir)*

Terima kasih Saudari Sumarsih atas waktunya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Demikian Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016. Terdapat beberapa masukan, himbauan, saran maupun koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2016. Keputusan DPRD ini selanjutnya akan diserahkan kepada Saudara Bupati, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rembang ke depan yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat.

Untuk keperluan tersebut, saya minta kepada Saudara Sekretaris DPRD bersedia memandu jalannya penyerahan surat Keputusan DPRD kepada Bupati.

Waktu saya serahkan kepada Saudara Sekretaris DPRD.

**==== PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN DPRD
DIPANDU SEKRETARIS DPRD ====**

Terimakasih Saudara Sekretaris DPRD atas waktunya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

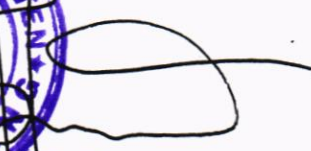
Agenda pembacaan dan penyerahan Keputusan DPRD telah kita lalui, maka selesai sudah acara dalam rapat paripurna ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan di dalam pelaksanaan rapat paripurna ini.

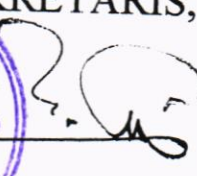
Akhirnya dengan mengucapkan "*Alhamdulillahirobbil 'alamin* " tepat pukul 12.25 WIB Rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,

H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,

Dfs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) ISTIMEWA
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG
PEMBACAAN REKOMENDASI ATAS LKPJ BUPATI
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016**

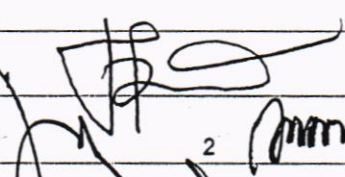
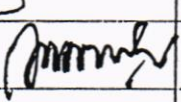
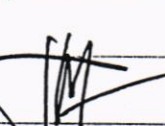
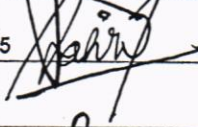
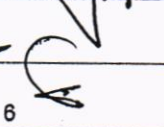
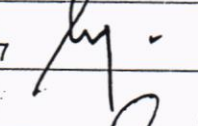
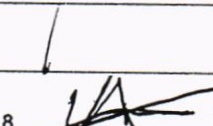
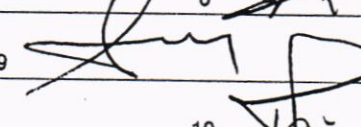
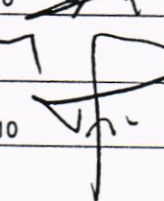
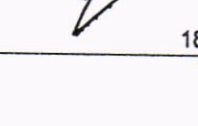
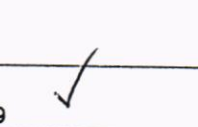
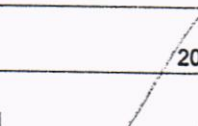
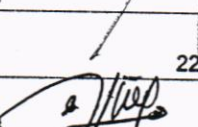
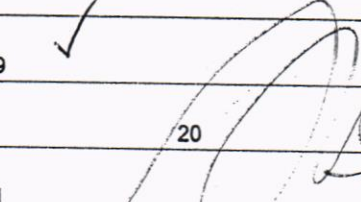
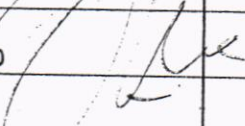
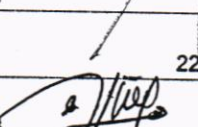
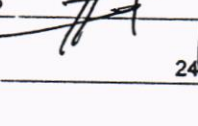
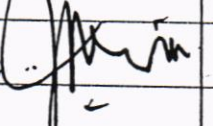
- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Keputusan DPRD Nomor ..12.... Tahun 2017
Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
Akhir Tahun Anggaran 2016;

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DALAM RANGKA PEMBACAAN REKOMENDASI
 ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

HARI/TANGGAL : SELASA, 25 APRIL 2017

PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota		
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	NUR HASYIM	Anggota		
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD		i
12	EDI KARTONO, S.Pd, .M.H.	Anggota		
13	IMRO' ATUS SOLICHAH, S.E, M.H.	Anggota		
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota		
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		
17	H. HARNO, S.E.	Anggota		
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota		
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		
21	ILYAS	Anggota		
22	SHOLEH, B.A	Anggota		
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota		
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota		

	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32	
	FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, 3P, M.H.	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44	
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

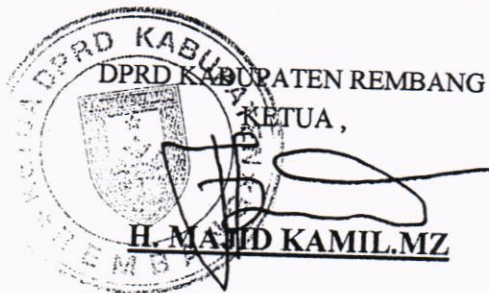
Keterangan :

1 I : Ijin

2 S : Sakit

3 C : Cuti

4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DALAM RANGKA PEMBACAAN REKOMENDASI
ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
HARI/TANGGAL : SELASA, 25 APRIL 2017
PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I	Bupati Rembang	1.
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2.
3	R. PRABOWO AJI SASMITO, S.S, M.H	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5		Dandim 0720 Rembang	5.
6	RIWAYAT SOSIYANTO	<i>Subag Rembang</i> Waka. Kepolisian Resort Rembang	6.
7	Drs. MAHZUMI, M.H	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8.

SEKRETARIS DPRD KAB REMBANG

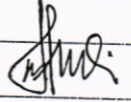
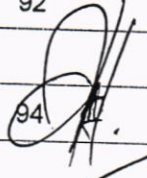
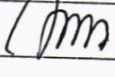
 *Signature*

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

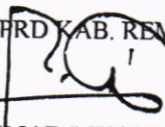
DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DALAM RANGKA PEMBACAAN REKOMENDASI
ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
HARI/TANGGAL : SELASA, 25 APRIL 2017
PUKUL : 11.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI	Warsono	SAB	2 W
3	STAF AHLI BUPATI	Non effendi	SAB/Kel	3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Alimawati	kerby	8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Kusni P		10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gantarto		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. UMUM			14
15	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Tri Hariyanto	kerby	15
16	BPPKAD			16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA			18
19	DINPERMADES			19
20	B K D			20
21	DINAS PMPTSP dan TENAGA KERJA			21
22	B P B D	Kuwanto	Kir rec.	22
23	DPU TATA RUANG			23
24	DINPERKIM			24
25	DINAS KESEHATAN			25
26	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA			26
27	DINAS INDAGKOP & UMKM	Hariyanto	Katir Kap. 27	27
28	DINTANPAN			28
29	DINLUTKAN			29
30	DISKOMINFO			30
31	DINAS PERHUBUNGAN	Sugeng	Hubbag Amun	31
32	DINAS DUKCAPIL			32
33	DINSOSIAL P2 KB	REGAT H/1	Selut	33
34	DINBUDPAR			34
35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS			36

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
37	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP			37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO			38
39	SATPOL PP			39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH			42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPU KAB. REMBANG			64
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
66	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
67	BTPN KCP. REMBANG			67
68	PERUM PEGADAIAN			68
69	BSM.BANK DANAMON			69
70	DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	PMI CAB. REMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76	DPD PARTAI GOLKAR			76

NO.	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	SUARA MERDEKA			84
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM	Masudi	Reporter	86 
87	RADIO R2B			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90
91	WIMBAR RAKYAT			91
92	CARAKA CANDI			92
93	KEDAULATAN RAKYAT			93 
94	POLRES PEG			94 
95	Eko Andjanto / Tapeun	Eko A.	Kadibag otas	95 
96	I. MUSLIGH M / MRE	Agus W	TA FIS	96 
97	SUDHA RTO / Sude	Stee	hjo	97 
98	Agus	Kodiam		98 
99	HUDA	Humas		99 
100	AL-Ayubi			100 
101	Suparjani	SBC TV		101 
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110
111				111
112				112
113				113
114				114
115				115
116				116
117				117
118				118

NO.	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
SETWAN

Drs. ACHMAD MUALIF
BNIP 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DALAM RANGKA PEMBACAAN REKOMENDASI
ATAS LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
HARI/TANGGAL : SELASA, 25 APRIL 2017
PUKUL : 11.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG		1
2	CAMAT KALIORI	M. USTHOLAH	2
3	CAMAT SUMBER	KAMDA NI	3
4	CAMAT SULANG	Stewart Haryanto	4
5	CAMAT BULU	SUKHATORO	5
6	CAMAT PAMOTAN	U. Wipon	6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE	Kurni	8
9	CAMAT LASEM	Haryanto	9
10	CAMAT PANCUR		10
11	CAMAT SEDAN	SUBHAN	11
12	CAMAT SLUKE	Subagyo	12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG	Eddy Kuswanto	14

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 12 TAHUN 2017

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dilakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016, yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jaminan Sosial Nasional ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Pegawai Negeri sipil;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang - undangan;
30. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021.
39. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 .
41. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan: Hasil Rapat Paripurna Internal Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 20 April 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk ditindaklanjuti.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 April 2017



REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

Berdasarkan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Rembang Akhir Tahun Anggaran 2016 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 25 April 2016 dan rapat-rapat pembahasan internal yang dilakukan, DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan rekomendasi – rekomendasi kepada Kepala Daerah Kabupaten Rembang untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan agar lebih baik , sebagai berikut :

I. UMUM.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Rembang adalah momentum penting bagi pemerintah Kabupaten Rembang untuk mengukur capaian kinerja pada tahun pertama berjalan. Oleh sebab itu harusnya dokumen LKPJ Akhir yang disajikan tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas melainkan menjadi pertanggungjawaban yang obyektif dan jujur . Pembenahan dan perbaikan dokumen yang justru DPRD harapkan ke depan agar sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 dimana disajikan perurusan per OPD secara berurutan dan sistematis yang lebih tepat disajikan oleh Bappeda tidak dibagian Tata Pemerintahan.

II. BIDANG-BIDANG

1. Bidang Kesehatan.

- a. Terkait dengan progam BLUD di masing-masing Pukesmas Kabupaten Rembang kami minta DKK untuk mengawal secara serius, mengevaluasi secara berkala terhadap kemampuan dan kesiapan Puskesmas dalam menjalankan program BLUD apabila dianggap tidak mampu menjalankan program tersebut kami merekomendasikan untuk ditinjau ulang kebijakan BLUD pada pukesmas .
- b. Semakin meningkatnya penderita HIV / AIDS di Kabupaten Rembang agar pemerintah daerah membuat laporan program khusus untuk menangani permasalahan tersebut.

2. Bidang Pemerintahan Umum

- a. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202 Ayat (3) dan juga merujuk pada PP Nomor 45 Tahun 2007 Pasal 14 yang menjelaskan bahwa Sekretaris Desa PNS

bisa di mutasikan setelah menjalani masa jabatan minimal 6 (enam) tahun. Bahwa disisi lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan peluang pada Sekretaris Desa PNS untuk memilih antara tetap menjadi perangkat atau mengajukan pindah tugas . Agar saudara Bupati segera membuat terobosan atau membuat Surat Keputusan supaya Sekdes-Sekdes PNS dipindah/dimutasi ke beberapa OPD sesuai dengan jenjang kepangkatan dan golongannya seperti Kabupaten-Kabupaten yang lain . Mengingat banyak sekali ditemukan dilapangan Sekretaris Desa tidak bisa bekerja sama dengan Kepala Desa.

- b. Bahwa saat ini di Kabupaten Rembang secara umum terjadi kekurangan Perangkat Desa , banyak Desa dimana Kepala Desanya mengeluh karena kurang optimalnya dalam bekerja dikarenakan kekurangan perangkat, ada juga yang Perangkat Desanya cukup tetapi kondisi usia sudah lanjut . Seiring dengan beban kerja Desa yang harus mempertanggungjawabkan Dana Desa yang cukup besar milyaran rupiah tentu dibutuhkan SDM yang cukup dan memadai . Oleh sebab itu agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera bertindak membuat regulasi Peraturan Bupati tentang Pengisian Perangkat yang tidak perlu terus berkutat soal status Desa. Harus berani membuat terobosan hukum seperti Kabupaten-Kabupaten lain.

3. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Kurangnya Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Rembang , untuk itu kedepan Pemerintah Kabupaten Rembang harus menyediakan anggaran dan lokasinya.
- b. Perlunya penanganan masalah kebersihan dan persampahan yang menyeluruh di Kabupaten Rembang, untuk itu agar Pemerintah Kabupaten Rembang mencari solusi dan tindakanya , sehingga Kabupaten Rembang bisa meraih Adipura kembali .
- c. Melihat dari buku LKPJ Bupati Rembang Akhir Tahun Anggaran 2016 pada Buku I halaman 22, dilaporkan bahwa jalan dalam keadaan baik mencapai (83 %) atau sepanjang 533,48 Km dan hanya berkisar sekitar (49 %) hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Untuk itu mohon dalam membuat laporan disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Mohon untuk Tahun Anggaran mendatang dalam tahapan Perencanaan kegiatan (kegiatan dengan anggaran yang besar) agar direncanakan pada tahun sebelumnya / (T-1) supaya pada

awal Tahun Anggaran baru kegiatan bisa segera berjalan dan kegiatan tidak menumpuk diakhir tahun .

5. Bidang Pariwisata

- a. Untuk memajukan potensi wisata Rembang dan menjadikan Dinas Pariwisata menjadi Dinas Unggulan sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang , maka perlu adanya strategi khusus tentang pemasaran potensi wisata di Kabupaten Rembang dengan diimbangi adanya pengelolaan yang baik dan SDM yang Profesional .
- b. Banyaknya potensi Pariwisata yang ada di Kabupaten Rembang yang masih belum dikembangkan , diharapkan agar Pemerintah Daerah lebih kreatif dalam menggali potensi wisata, sehingga dapat meningkatkan industri kepariwisataan yang ada di Kabupaten Rembang dan berdampak pula pada peningkatan PAD pada sektor Pariwisata dan Peningkatan Perekonomian di masyarakat .

6. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

Agar Pemerintah Daerah meningkatkan anggaran untuk menggali dan mengkaji secara mendalam terkait dengan sejarah yang ada di Kabupaten Rembang yang diharapkan dapat menambah khasanah budaya Kabupaten Rembang .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Ketua, →

SH. MAJID KAMIL MZ